

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan sistem yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur semua sumber daya di daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah harus melaksanakan dan menata setiap agenda yang akan dilaksanakan di daerah tersebut.

Otonomi Daerah adalah bentuk penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan tersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi pemerintahan sebagai stakeholders harus memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus segera diselesaikan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan tidak melakukan bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang serta melampaui batas kewenangannya. Hal ini akan menciptakan bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Dalam pemerintahan daerah memerlukan laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan suatu pemerintahan dengan menganalisis laporan keuangan.

Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, alat tulis yang dilaksanakan disebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa sering di

sebut tender ini sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta Nasional maupun internasional. Intinya pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan performance mereka.



Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara. Dalam rangka kebijakan fiscal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya asing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa public. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. (Maria Avalia, 2014).

Bagian keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu lembaga atau organisasi. Untuk dapat semakin berkembang, khususnya pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mencermati dan menganalisis kinerja pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan terhadap laporan keuangan.

Analisis laporan keuangan dalam banyak hal mampu memberikan indikator penting terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat pertimbangan dalam pengambilan keputusan keuangan dan serta mendeskripsikan kinerja perusahaan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya secara finansial dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar. Kinerja keuangan suatu perusahaan membutuhkan petunjuk yang relevan berhubung dengan aktivitas perusahaan pada waktu tertentu untuk pihak tertentu. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan yang sangat bermanfaat bagi investor, kreditur, analis, dan pemerintahan.

Bagi pemerintah daerah hasil laporan keuangan ini dapat digunakan untuk membuat perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan serta pengambilan keputusan. Selain pihak internal, analisis laporan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik (masyarakat) dan sebagai alat untuk memonitor dan menilai efisiensi kinerja yang memungkinkan bagi pihak eksternal untuk menilai efektifitas dan efisiensi pengguna sumber daya. Saat ini masyarakat juga telah berada pada era keterbukaan.

Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah maju dan terus berkembang dari waktu ke waktu, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi, sehingga lebih sulit untuk dibohongi. Dalam hal keuanganpun, masyarakat semakin cerdas untuk menuntut adanya transparansi. Pemerintah pusat

maupun daerah dituntut lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan public yang harus diterima secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, menentukan tingkat kepatuhan perundangan yang terkait dan mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Kantor Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso. Halim (2002) mengatakan bahwa “Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan”. Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan analisis laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Poso yang tertuang dalam penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Poso”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana kinerja keuangan pada kantor pengadaan barang/jasa kabupaten Poso ditinjau dari rasio efisiensi dan rasio keserasian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui kinerja keuangan pada kantor pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso ditinjau dari rasio efisiensi dan rasio keserasian.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu :

1. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan mengenai penilaian kinerja keuangan pada kantor pengadaan barang/jasa.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna untuk peneliti lain sebagai sumber yang bermanfaat sebagai data sekunder.

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana (strata 1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

